

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Januari 2025 terjadi deflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Ngada sebesar 0,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,84.

Deflasi y-on-y terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 9,91 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,15 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran lain mengalami kenaikan, yaitu: kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,60 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,57 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,09 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,93 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,21 persen; kelompok transportasi sebesar 0,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,66 persen. Sedangkan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Pada bulan Januari 2025 secara month to month (m-to-m) di Kabupaten Ngada terjadi deflasi dengan tingkat deflasi month to month (m-to-m) sebesar 1,28 persen. Pada bulan Januari 2025 secara year to date (y-to-d) di Kabupaten Ngada terjadi deflasi dengan tingkat deflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,28 persen.

Pada Februari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Ngada sebesar 0,27 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,44.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,53 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,42 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,21 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,89 persen; kelompok transportasi sebesar 0,86 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran lain mengalami penurunan, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 9,85 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,15 persen. Sedangkan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Pada bulan Februari 2025 secara month to month (m-to-m) di Kabupaten Ngada terjadi inflasi dengan tingkat inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,57 persen. Pada bulan Februari 2025 secara year to date (y-to-d) di Kabupaten Ngada terjadi deflasi dengan tingkat deflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,72 persen.

Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Ngada sebesar 2,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,51.

Pada bulan Maret 2025 secara month to month (m-to-m) di Kabupaten Ngada terjadi inflasi dengan tingkat inflasi month to month (m-to-m) sebesar 1,96 persen. Pada bulan Februari 2025 secara year to date (y-to-d) di Kabupaten Ngada terjadi deflasi dengan tingkat deflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,23 persen.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan pengendalian inflasi di daerah, khususnya di Kabupaten Ngada meliputi:

1. Terbatasnya kapasitas produksi;
2. Belum efektifnya konektivitas jaringan distribusi pangan dimana tingkat ketergantungan pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi;
3. Kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar ditambah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar lokal.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada prinsipnya pengendalian inflasi di daerah khususnya di Kabupaten Ngada memiliki pedoman baku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui TPIP dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah melalui TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Ngada berupa penetapan Roadmap (Peta Jalan) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030.

Pengendalian inflasi di Kabupaten Ngada, Pemerintah secara periodik melakukan:

1. Pengendalian harga/keterjangkauan harga;
2. Pengendalian produksi/ketersediaan pasokan;
3. Penguatan dari aspek supply dan distribusi;
4. Peningkatan efektivitas informasi pengendalian inflasi kepada masyarakat

Selain itu sebagai upaya pemulihan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Ngada merujuk pada kebijakan nasional melakukan percepatan realisasi APBD bagi belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi daerah utamanya pada sasaran startegis pembangunan diantaranya kedaulatan pangan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2030 .

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keadaan triwulan I 2025 pengendalian inflasi di Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Pemerintah beserta stakeholders cukup efektif dalam menjaga laju inflasi melalui kestabilan harga/keterjangkauan harga terutama harga barang kebutuhan pokok disamping terus memperkuat dan meningkatkan sektor produksi bagi penyediaan (*supply*) bahan kebutuhan pokok. Salah satu penyebab tingginya harga beberapa bahan pokok disebabkan oleh rantai distribusi yang panjang yang membuat pendapatan petani tidak sebesar harga yang beredar di pasaran.

Aspek kelembagaan petani, belum memiliki posisi tawar yang kuat serta panjangnya rantai distribusi produk pertanian membuat harga komoditas cenderung tidak stabil dikarenakan tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur harga. Oleh karena itu regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kestabilan harga komoditas yang berpengaruh terhadap pengendalian inflasi. Regulasi ini penting sejauh mana kemudian penguatan terhadap kebijakan-kebijakan sektor pertanian, bagaimana kemudian produk-produk pertanian kita jaga. Se jauh mana kita bisa memanfaatkan produk kita, sejauh mana kita bisa bekerjasama antar daerah, karena itu menjadi bagian penting yang harus kita bersama selesaikan.

Catatan konstruktif terkait kebijakan pengendalian inflasi di daerah terutama dalam situasi dimana kecenderungan pergerakan ekonomi melambat adalah Pemerintah beserta stakeholder terkait melalui TPID baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Ngada secara sinergi melalui kebijakan inflasi diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui:

1. Percepatan realisasi APBD bagi belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi daerah;
2. Kepastian ketersediaan produksi pangan termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian;
3. Meningkatkan peran UMKM termasuk mengoptimalkan lembaga ekonomi pedesaan atau BUMDES;
4. Penguatan rantai pasokan lokal serta mendorong peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan melalui Percepatan Akses Keuangan Daerah pada tingkat Kabupaten Ngada;
5. Mendorong peningkatan UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi guna mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Catatan konstruktif terkait kebijakan pengendalian inflasi:

1. Administered price khususnya tingginya biaya transportasi udara di wilayah NTT;
2. BI NTT kiranya dapat memfasilitasi offtaker terkait Kerjasama Antar Daerah;
3. Perlu dilakukan koordinasi berkala oleh Pemprov NTT terkait komitmen kebijakan anggaran Pemkab berkaitan dengan penanganan inflasi dan pengembangan ekonomi.